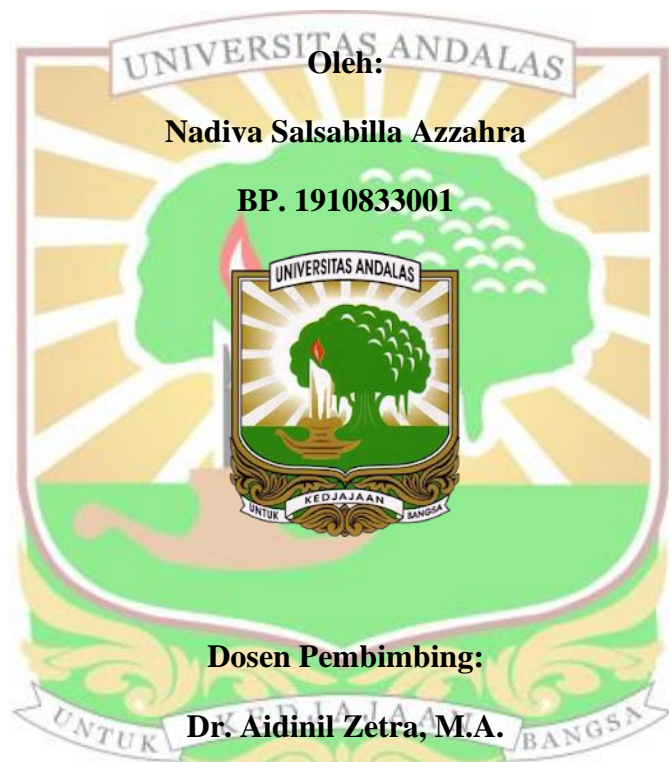


**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT DALAM PENGELOLAAN URUSAN LINGKUNGAN  
HIDUP TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**Dewi Anggraini, S.IP., M.Si**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Pelaksanaan desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup di Sumatra Barat belum menunjukkan peran pemerintahan daerah dalam kerangka *check and balances*. Urgensi pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam Program Unggulan Pemerintah Daerah Sumatra Barat menjadi fokus persoalan lingkungan hidup yang memerlukan pengawasan dalam penyelenggaraannya. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan sampah sebagai sumber energi alternatif (*waste to energy*) dan tersedianya tempat pengolahan limbah B3 didukung melalui tiga program pendukung yaitu Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Limbah B3, dan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan memiliki kewenangan berupa fungsi pengawasan untuk mengontrol penyelenggaraan urusan lingkungan hidup terutama pada ketiga program pendukung program unggulan mulai dari aspek pembentukan program, penganggaran program, hingga pelaksanaan program. Tujuan penelitian ini ingin melihat tindak lanjut DPRD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap program kebijakan lingkungan yang sudah disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta menggunakan Lima Aspek Pengawasan dalam Teori Kekuasaan Legislatif oleh Jimly Asshiddiqie. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sumatra Barat dalam pengelolaan urusan lingkungan hidup pada tiga program pendukung secara keseluruhan berjalan baik. Namun dalam pengawasan tahap awal, pertimbangan atas penentuan program dan penganggaran tidak begitu signifikan. Kemudian pengawasan DPRD terhadap Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat secara politis kurang optimal dibanding pengawasan terhadap Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian Limbah B3. Hal ini dikarenakan DPRD terlalu fokus pada penitipan pikir di program tersebut.

**Kata kunci: Fungsi Pengawasan DPRD; Urusan Lingkungan Hidup; Pengelolaan Sampah**

## ABSTRACT

*The implementation of decentralization of environmental management in West Sumatra has not yet shown the role of local government in the framework of checks and balances. The urgency of environmental management listed in the West Sumatra Regional Government's Flagship Program is the focus of environmental issues that require supervision in its implementation. The optimization of sustainable waste management at the Regional Landfill with waste as an alternative energy source (waste to energy) and the availability of B3 waste treatment plants is supported through three supporting programs, namely the Waste Management Program, the B3 Waste Control Program, and the Environmental Education, Training and Counseling Program for the Community. The Regional People's Representative Council (DPRD) as a representative institution has the authority in the form of a supervisory function to control the implementation of environmental affairs, especially in the three supporting programs of the flagship program starting from the aspects of program formation, program budgeting, to program implementation. The purpose of this research is to see the follow-up of DPRD in the implementation of supervision of environmental policy programs that have been agreed upon in the Regional Budget (APBD). This research uses a qualitative method with a case study approach, and uses Jimly Asshiddiqie's Five Aspects of Supervision in Legislative Power Theory. The results of the research that has been conducted show that the implementation of the West Sumatra DPRD's supervisory function in the management of environmental affairs in the three supporting programs is overall going well. However, in the early stages of supervision, consideration of the determination of programs and budgeting is not so significant. The DPRD's supervision of the Environmental Education, Training and Counseling Program for the Community is politically less optimal than the supervision of the Waste Management Program and the Hazardous and Toxic Waste Control Program. This is because DPRDs are too focused on entrusting pokir in these programs.*

**Keywords:** *DPRD Supervisory Function; Environmental Affairs; Waste Management*